

BAB II

TINJAUAN PUSTASKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Akuntabilitas

2.1.1.1 Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban bagi seseorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab yang diemban telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam konteks ini, akuntabilitas berarti memberikan pertanggungjawaban atas kepercayaan dan amanah yang telah dipercayakan kepada pihak sekolah (Wiratna, 2015:28).

Menurut Sarsiti (2020:40), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak yang diberi amanah (*agent*) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas atau kegiatan kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewajiban dalam pertanggungjawaban tersebut.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 1 Ayat 14 dijelaskan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan atas berhasil atau tidaknya suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan yang direncanakan oleh para pemangku kepentingan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas dan amanah yang diemban,

dengan memberikan penjelasan transparan mengenai pengelolaan sumber daya publik dan hasil pelayanan. Hal ini juga mencakup penerapan mekanisme pengawasan melalui distribusi kekuasaan guna mencegah pemusatan kekuasaan dan memastikan sistem saling mengawasi.

2.1.1.2 Tujuan Akuntabilitas

Menurut Rakhmawati (2018:108), tujuan dari akuntabilitas adalah untuk membangun kepercayaan publik. Sekolah yang memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi akan mendorong partisipasi yang lebih besar dalam pengelolaan manajemen sekolah. Mekanisme akuntabilitas bergantung pada kondisi dan sistem masing-masing instansi, yang mencakup siapa yang bertanggung jawab atas akuntabilitas, kepada siapa akuntabilitas harus disampaikan, tujuan dilakukannya akuntabilitas, serta cara pelaksanaan akuntabilitas tersebut.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2016:19), akuntabilitas terdiri atas dua jenis diantaranya:

- 1) Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*), merupakan pertanggungjawaban untuk memberikan laporan atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Setiap pejabat publik baik individu maupun kelompok harus terstruktur melaporkan perkembangan kinerja atau hasil kegiatan yang telah dilaksanakan kepada atasan mereka.
- 2) Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*), merupakan pertanggungjawaban untuk memberikan laporan kepada masyarakat secara luas.

Setiap lembaga negara, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus bertanggung jawab atas semua amanat yang diberikan kepada mereka dan menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada publik.

2.1.1.4 Pengukuran Akuntabilitas

Menurut Mahmudi, (2016:19), Indikator Akuntabilitas meliputi:

- 1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability for Probity and Legality*). Akuntabilitas hukum dan kejujuran merujuk pada kewajiban lembaga publik untuk bertindak dengan integritas dalam melaksanakan tugasnya dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dana publik harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan otorisasi yang telah ditetapkan.
- 2) Akuntabilitas Manajerial (*Managerial Accountability*). Akuntabilitas manajerial berkaitan dengan tanggung jawab lembaga publik dalam mengelola organisasi secara efektif dan efisien. Hal ini juga dikenal sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*).
- 3) Akuntabilitas Program (*Program Accountability*). Akuntabilitas program berfokus pada pertanggungjawaban lembaga dalam memastikan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah alternatif program yang dipilih memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan program yang telah direncanakan.
- 4) Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*). Akuntabilitas mengacu pada kewajiban lembaga publik untuk memberikan pertanggungjawaban

terkait kebijakan yang telah diambil. Lembaga publik harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dalam setiap kebijakan yang ditetapkan.

- 5) Akuntabilitas Finansial (*Financial Accountability*). Akuntabilitas finansial adalah kewajiban lembaga publik untuk menggunakan dana publik dengan cara yang ekonomi, efisien, dan efektif, tanpa adanya pemborosan, kebocoran dana, atau praktik korupsi.

2.1.2 Transparansi

2.1.2.1 Definisi Transparansi

Menurut Mahsun (2015:32), transparansi merupakan penyampaian informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa masyarakat berhak mengetahui secara jelas dan menyeluruh tentang pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan serta kepatuhannya terhadap peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, menurut Mursyidi (2015:44) transparansi merupakan penyampaian informasi keuangan yang jelas dan jujur, karena masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang terbuka dan komprehensif mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya, serta ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Transparansi dibangun berdasarkan adanya aliran informasi yang bebas, dimana seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi yang ada

perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, informasi yang disediakan harus cukup memadai agar dapat dipahami dan diawasi dengan baik (Coryanata, 2015:99). Dengan demikian, transparansi berarti penyampaian informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada publik, berdasarkan prinsip bahwa masyarakat memiliki hak dan untuk mengetahui secara menyeluruh dan terbuka mengenai pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah prinsip yang memastikan setiap individu memiliki akses atau kebebasan untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan pemerintah, termasuk kebijakan, proses pengambilan keputusan, pelaksanaannya, serta hasil yang telah dicapai.

2.1.2.2 Tujuan Transparansi

Menurut Undang- Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008, menyebutkan tujuan transparansi antara lain: (1) memastikan hak masyarakat dalam memperoleh informasi terkait rencana penyusunan kebijakan, program kebijakan, serta proses dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan publik, (2) mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau penetapan kebijakan publik, (3) memperkuat peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, (4) menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, (5) memberikan pemahaman yang jelas mengenai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan publik.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini melalui kesadaran akan kontrol sosial oleh masyarakat, sekaligus memperluas wawasan dan meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, transparansi juga bertujuan membangun hubungan saling percaya antara pihak sekolah dan masyarakat dengan menunjukkan bahwa sekolah merupakan lembaga pelayanan pendidikan yang bersih dan profesional, yang diwujudkan melalui penyampaian informasi yang mudah diakses oleh masyarakat (Jumianti, 2018:9).

2.1.2.3 Manfaat Transparansi

Menurut Andrianto (2017:21) , berikut beberapa manfaat penting adanya transparansi:

- 1) Transparansi berperan dalam mencegah praktik korupsi yang mungkin dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam suatu organisasi.
- 2) Mempermudah proses identifikasi terhadap kelemahan maupun keunggulan suatu kebijakan.
- 3) Meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat lebih mudah menilai kinerja lembaga bersangkutan.
- 4) Membangun kepercayaan masyarakat terhadap komitmen lembaga dalam menetapkan suatu kebijakan tertentu.
- 5) Memperkuat hubungan sosial, baik antara masyarakat dengan masyarakat lainnya maupun antara masyarakat dengan pemangku kebijakan, melalui peningkatan kepercayaan terhadap lembaga.

- 6) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif serta memberikan kepastian dalam menjalankan usaha.

2.1.2.4 Pengukuran Transparansi

Menurut Mardiasmo (2018:19), indikator transparansi adalah sebagai berikut:

- 1) *Informativeness* (informatif), merujuk pada penyampaian aliran informasi, berita, penjelasan mengenai mekanisme, prosedur, data, serta fakta kepada para pemangku kepentingan yang memerlukan informasi secara jelas dan akurat.
- 2) *Openness* (keterbukaan), dimensi keterbukaan informasi publik memberikan hak kepada setiap individu untuk mengakses data yang tersedia pada badan publik. Hal ini menegaskan bahwa seluruh informasi publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pihak yang membutuhkan.
- 3) *Disclosure* (pengungkapan), merupakan pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial.

2.1.3 Partisipasi Komite Sekolah

2.1.3.1 Definisi Partisipasi

Menurut Andriani (2018:112), Partisipasi merupakan keterlibatan individu secara sadar dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan demikian, seseorang dikatakan berpartisipasi ketika berada di dalam atau bersama suatu kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan anggota lain terkait nilai, tradisi, emosi, loyalitas, kepatuhan, serta tanggung jawab bersama.

Sedangkan menurut Dwiningsi (2015:50), partisipasi merupakan keterlibatan seseorang secara mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorong untuk mendukung pencapaian tujuan kelompok serta tanggung jawab atas kelompok tersebut. Partisipasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat.

Menurut Permendikbud Nomor 44 Tahun 2022 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah menyebutkan bahwa perlu adanya partisipasi dan dukungan masyarakat yang lebih optimal untuk meningkatkan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan mewujudkan demokratisasi pendidikan.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan hak dan kewajiban bagi para pemangku kepentingan untuk terlibat secara aktif dalam proses pembuatan dan pengambilan keputusan suatu organisasi guna mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pengelolaan dana BOS, partisipasi orang tua merupakan tanggung jawab dan hak untuk berkontribusi aktif dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan sekolah terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2.1.3.2 Pengukuran Partisipasi

Indikator partisipasi stakeholders dalam hal ini komite sekolah mengacu pada UU No 44 Tahun 2022 tentang peran dewan pendidikan dan komite sekolah yaitu sebagai :

- 1) Pemberi pertimbangan (*Advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.

- 2) Pendukung (*supporting agency*), baik berupa financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- 4) Mediator antara pemerintah (executif) dan masyarakat di satuan pendidikan.

2.1.4 Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasioanal Sekolah

2.1.4.1 Konsep Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan dari hasil program yang telah ditetapkan atau diharapkan yang dicapai melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sebuah program dianggap efektif jika tujuan dan sasaran akhir kebijakan dapat tercapai dengan baik (Mardiasmo, 2018:4).

Menurut Sondang (2019:24), efektivitas merupakan penggunaan sumber daya, sarana, dan prasarana yang telah ditetapkan secara sadar dan terukur untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan. Efektivitas mencerminkan keberhasilan berdasarkan tercapainya sasaran yang telah ditentukan. Semakin mendekati sasaran yang diinginkan, maka semakin tinggi tingkat efektivitas suatu kegiatan.

Sedangkan menurut Bastian (2015:31), efektivitas merupakan interaksi antara keluaran dan tujuan, dimana efektivitas dapat diukur dengan mengetahui sejauh mana tingkat keluaran, peraturan, dan kebijakan organisasi dapat mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

2.1.4.2 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana Bantuan Operasional (BOS) merupakan instrumen utama dalam sistem pendidikan Indonesia untuk meningkatkan akses, kualitas, dan keberlanjutan operasional sekolah, khususnya bagi siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Penerima Dana BOS dalam pasal 7 Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 meliputi SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB, dan SMK.

Menurut Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 pasal 8, syarat penerima dana BOS meliputi:

- a) memiliki NPSN yang terdata pada Aplikasi dapodik;
- b) telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya;
- c) memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada aplikasi Dapodik;
- d) memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan;
- e) tidak merupakan Satuan Pendidikan kerja sama; dan
- f) tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain.

2.1.4.3 Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Tercantum dalam pasal 38 ayat (1) bagian ketiga Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022, Dalam Komponen Penggunaan Dana BOS menyebutkan

bahwa dana BOS digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS. Komponen penggunaan dana BOS Reguler dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (2) yang mencakup antara lain:

- a) penerimaan Peserta Didik baru;
- b) pengembangan perpustakaan;
- c) pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- d) pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
- e) pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
- f) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
- g) pembiayaan langganan daya dan jasa;
- h) pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
- i) penyediaan alat multimedia pembelajaran;
- j) penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
- k) penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/
atau
- l) pembayaran honor.

2.1.4.4 Larangan Penggunaan Dana Operasional Sekolah

Menurut Pasal 48 ayat (2) bagian kelima dari Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang tata cara penggunaan dana BOS disebutkan bahwa penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidik (BOSP) tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja dan kegiatan yang sudah dibiayai secara penuh

oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.4.5 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Menurut Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 Pasal 2 menyebutkan bahwa pengelolaan dana BOSP dilakukan berdasarkan prinsip:

- a) fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana;
- b) efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
- c) efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d) akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

2.2 Kajian Empiris

Beberapa penelitian terdahulu yang membantu penulis dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diuji, yaitu variabel

akuntabilitas (X), Transparansi (X), dan Partisipasi Orang Tua (X), terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Y). Penelitian terdahulu dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Ita Rakmawati (2018) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dengan Partisipasi Stakeholders Sebagai Variabel Moderasi pada SMA Negeri di Kabupaten Kudus.
- 2) Faisyal Ammar dan Bustamam (2019) dengan judul Analisis Akuntabilitas, Transparansi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada SMP Negeri 3 Dan SMP Islam YPU Darul Ulum Di Kota Banda Aceh).
- 3) Siti Maimunah dan Elgina (2023) dengan judul Analisis Implementasi Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Untuk Mendorong Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Bogor.
- 4) Innanawati, Maya Widyana Dewi dan Desy Nur Partiwi (2024) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Pengawasan dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMK Negeri 1 Mojosongo.
- 5) Alya Elita Sjioen dan Stefen Ratu Ludji (2020) dengan judul Analisis Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Negeri Bonipoi 2 Kota Kupang.

- 6) Sudyartini dan Zaenal Wafa (2024) dengan judul Pengaruh Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Yogyakarta”.
- 7) Kurnia Ulfah Fadhilah, Ade Irma Suryani Lating, Alphasyah Sidarta dan Sulthon Falih Rasyid Rabbani (2023) dengan judul Pengaruh penerapan Good School Governance Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Surabaya.
- 8) Iga SriMoerni dan Arief Darmawan (2021) dengan judul Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
- 9) Muhammad Yusra, Nur Afni Yunita, Nurhasanah dan Arliansyah (2021) dengan judul Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) pada SD di Kecamatan Jambo Aye, Aceh Utara: Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi.
- 10) Adinda Amalia Putri Tanjung, Nelly Masnila dan M. Husni Mubarak (2022) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Orang Tua Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SD Dan SMP.
- 11) Yohanis Lotong Ta'dung, Isak Pasulu, Dwibin Kannapadang, Jens Batara Marewa (2022) dengan judul Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA Katolik Rantepao, Toraja Utara.

- 12) Dani Rachman, Djodi Setiawan dan Reza Maftuh Taufik Nugraha (2022) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SMA Sasama.
- 13) Suhesti Ningsih, Selvi Puspitasari dan Abdul Haris Romdhoni (2022) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Sekolah Dan Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Partisipasi Orang Tua Siswa.
- 14) Anggit Puteri Septhiningrum, Maxion Sumtaky dan Diana Zuhroh (2023) dengan judul Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK/SMA di Kabupaten Mojokerto.
- 15) Nur Aini Salam, Salim Basalamah, Subhan (2023) dengan judul Pengaruh Penerapan Good School Governance Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 5 Luwu.
- 16) Rosa Agestina, Yuwita Ariessa Pravasanti, dan LMS. Kristiyanti (2023) dengan judul Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Pada SMA dan Sederajat di Kecamatan Simo.
- 17) Hendri Susanti (2019) dengan judul Penerapan Good School Governance Dan Pengaruhnya Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Kota Blitar.
- 18) Ria Lindawati (2024) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS di SMK XYZ Jakarta.

19) Catur Martian Fajar dan Sulistiawati (2024) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Cimahi.

20) Nurul Widiana Amin, Eni Indriani dan Yusli Mariadi (2022) dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Mataram Tahun 2021”.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ita Rakhmawati (2018). “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dengan Partisipasi Stakeholders Sebagai Variabel Moderasi”	Variabel Independen: Akuntabilitas, Transparansi Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Dana BOS	Variabel Independen: Partisipasi Komite Sekolah Variabel Moderasi: Stakeholder, Alat analisis: Regresi Moderasi dengan Uji Interaksi	Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, sedangkan Transparansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Partisipasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan dalam memoderasi hubungan antara Akuntabilitas	Jurnal Akuntansi Syariah, Vol. 1, No. 1, Juni 2018, Halaman 95-112, ISSN: 2622-5255 ISSN: 262245

					dengan efektivitas pengelolaan dana BOS. Partisipasi berpengaruh positif dan signifikan dalam memoderasi hubungan Transparansi pada Efektivitas pengelolaan dana BOS.		
2.	Ammar dan Bustamam (2019). “Analisis Akuntabilitas, Transparansi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada SMP Negeri 3 Dan SMP Islam YPU Darul Ulum Di Kota Banda Aceh)”	Variabel Independen: Akuntabilitas, Transparansi Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Dana BOS	Variabel Independen: Partisipasi Komite Sekolah	Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol.4, No. 1, (2019) Halaman 116-130, E-ISSN 2581-1002		
3.	Maimunah dan Elgina (2023) “Analisis Implementasi Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Untuk Mendorong Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah”.	Variabel Independen: Akuntabilitas, Transparansi Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Dana BOS	Variabel Independen: Partisipasi Komite Sekolah	Implementasi prinsip akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Implementasi prinsip transparansi tidak berpengaruh terhadap	Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi (JIAFE), Vol. 9, No.2, Tahun 2023, Hal 173-188. E-ISSN: 2502-4159 P-ISSN: 2502-3020.		

				efektivitas pengelolaan dana BOS.		
4.	Innanawati, Dewi dan Partiwi (2024) “Pengaruh Akuntabilitas, Pengawasan dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMK Negeri 1 Mojosongo	Variabel Independen: Akuntabilitas , Transparansi Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).	Variabel Independen: Pengawasan ,Partisipasi Komite Sekolah Alat analisis: Uji Kualitas Data	Pengawasan dan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Sedangkan akuntabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.	Jurnal keuangan Akuntansi Bisnis, 2024, 3(1): 456- 463, ISSN: 2962- 2433.	Ilmiah
5.	Sjioen dan Ludji (2020) “Analisis Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Negeri Bonipoi 2 Kota Kupang”	Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).	Variabel Independen: Akuntabilita s, Transparans i, Partisipasi Komite sekolah Alat analisis: Analisis Deskripsi Kuantitatif, Analisis <i>value for money</i>	Pengelolaan dana BOS pada SDN Bonipoi 2 kota Kupang kurang efektif karena belum sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, hal ini disebabkan karena pengelolaan dana BOS yang seharusnya dikelola oleh kepala sekolah dan juga alokasi biaya penggunaan dana BOS terdapat biaya lain-lain yang tidak dijelaskan.	Jurnal Inspirasi Ekonomi, Vol. 2 No. 3 September 2020 ISSN 2503-3123	

6.	Sudyartini dan Wafa (2024) “Pengaruh Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Yogyakarta”.	Variabel Independen: Akuntabilitas, Transparansi Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).	Variabel Independen: Partisipasi Komite Sekolah	Transparansi dan Akuntabilitas memiliki dampak positif terhadap keefektifan dalam pengelolaan dana BOS.	Journal on Education, Vol. 06, No. 03, Maret-April 2024, E-ISSN 2654-5497, P-ISSN 2655-1365.
7.	Fadhilah, Lating, Sidarta dan Rabbani (2023) “Pengaruh penerapan Good School Governance Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Surabaya”.	Variabel Independen: Transparansi, Akuntabilitas Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).	Variabel Independen: Partisipasi Komite Sekolah	Secara individu prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Independensi, keadilan, Partisipasi dan Orientasi Konsesus tidak memiliki dampak yang signifikan secara statistik pada efektivitas Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).	Jurnal Buana Akuntansi, Vol. 8, No. 2, ISSN 2528-1119 E-ISSN 2580-5452.
8.	Moerni dan Darmawan (2021). “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Manyar	Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Dana BOS.	Variabel Independen: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Alat analisis: Uji regresi sederhana	Pengelolaan dana BOS tingkat MI di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sudah dilaksanakan secara efektif, hal ini terlihat dari adanya 4 (empat) faktor yang	Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 1 No. 1 (2021), 51-58.

Kabupaten Gresik”				mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana BOS yaitu, Perencanaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban dana BOS.	
9.	Yusra, Nurhasanah dan Arliansyah (2021) “Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD di Kecamatan Jambo Aye, Aceh Utara: Partisipasi <i>Stakeholder</i> Sebagai Variabel Moderasi”	Variabel Independen: Akuntabilitas , Transparansi Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Dana BOS	Variabel Moderasi: Partisipasi <i>Stakeholder</i>	Secara simultan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Secara parsial akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Partisipasi <i>stakeholder</i> mampu memperngaruhi akuntabilitas dengan efektivitas pengelolaan dana BOS, Partisipasi <i>stakeholder</i> mampu mempengaruhi transparansi dengan efektivitas pengelolaan	Jurnal Visioner & Strategis, Vol. 10, No. 1, 2021, ISSN: 2338-2864, Hal 79- 86

				dana BOS, Partisipasi <i>stakeholder</i> mampu mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana BOS.	
10.	Tanjung Masnila dan Mubarak (2022). “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Orang Tua Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SD Dan SMP”	Variabel Independen: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Orang Tua Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Dana BOS	Lokasi dan Populasi sampel: SMA di Kota Tasikmalaya	Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional (BOS), Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan Partisipasi Orang Tua berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).	Jurnal Syntax Adminiration, Vol. 3 No. 8 Agustus 2022 p-ISSN 2722-7782 e-ISSN 2722-5356
11.	Ta’dung Pasulu, Kannapadang, Marewa (2022) “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan	Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Dana BOS.	Variabel Independen: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi	Efektivitas realisasi pengelolaan dana BOS tahap I adalah 101,35 artinya pengelolaan	Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis Vol.2, No.2 MEI 2022 e-ISSN: 2962-4797; p-ISSN

	Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA Katolik Rantepao, Toraja Utara”	Komite Sekolah	dana BOS pada SMA Katolik Rantepao sangat efektif dari anggaran tahap I sebesar 215.100.000, tahap II 100% dengan kriteria efektif dari anggaran Rp 2886.800.000 dan tahap II persentasenya 72,51% dengan kriteria kurang efektif karena dari anggaran sebesar Rp 211.950.000 dan realisasinya pada tahap III sebesar Rp 211.950.000.	2962-3596, 167-175	Hal
12.	Rachman Setiawan dan Nugraha (2022) “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SMA Sasama”	Variabel Independen: Akuntabilitas, Transparansi Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Dana BOS	Variabel Independen: Partisipasi Komite Sekolah	Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS	Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 13, No. 3, Hal 73-86, September-Desember 2022 P-ISSN 2086-6648 E-ISSN 2656-6648
13.	Ningsih, Puspitasari dan Romdhoni (2022) “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Sekolah Dan Pengelolaan	Variabel Independen : Akuntabilitas, Transparansi	Variabel Independen : Partisipasi Komite Sekolah Variabel Dependen: Efektivitas	Hasil uji t membuktikan bahwa akuntabilitas dan pengelolaan dana BOS berpengaruh terhadap partisipasi orang	Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol. 23, No. 1 (2022), ISSN: 1412-629X e-ISSN 2579-3055.

	Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Partisipasi Orang Tua Siswa”.		Pengelolaan Dana BOS	tua, sedangkan transparansi tidak berpengaruh terhadap partisipasi orang tua . Akuntabilitas, Transparansi dan Pengelolaan dana BOS berpengaruh terhadap partisipasi orang tua sebesar 73,80% sedangkan 26,20% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.	
14.	Septiningrum, Sumtaky dan Zuhroh (2023) “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK/SMA di Kabupaten Mojokerto”	Variabel Independen : Akuntabilitas Transparansi Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Dana BOS	Variabel Independen : Partisipasi Komite sekolah Metode penelitian: Campuran	Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.	JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan) Vol. 10, No.1 2023 hal 92-102 E-ISSN 2460-2132
15.	Salam Basalamah, Subhan (2023) “Pengaruh Penerapan Good School Governance Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana	Variabel Independen: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Dana BOS	Variabel Independen: <i>Independen cy</i> (kemandirian)	Akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah, Transparansi memiliki	Jurnal Ilmu ekonomi Vol.6 No.3, Juli 2023, e-ISSN: 2622-6383

Operasional Sekolah (BOS)”			pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, partisipasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, Independency (kemandirian) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).			
16.	Agestina, Pravasanti, dan Kristiyanti (2023). “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Pada SMA dan Sederajat di Kecamatan Simo”	Variabel Independen: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Orang Tua, Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Dana BOS.	Populasi: SMA di Kota Tasikmalaya	Akuntabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Sedangkan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Selanjutnya partisipasi orang tua berpengaruh negatif terhadap efektivitas	Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis 2023; 2(2): 349-357 ISSN 2962-2433	

				pengelolaan dana BOS.		
17.	Susanti (2019) “Penerapan Good School Governance Dan Pengaruhnya Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Kota Blitar”.	Variabel Independen: Akuntabilitas, Transparansi	Variabel Independen: Partisipasi Komite Sekolah Variabel Dependen: Kinerja Pengelolaan Dana BOS, Efektivitas Pengelolaan Dana BOS	Secara parsial Partisipasi dan Transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Sedangkan Akuntabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Secara simultan Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.	Jurnal Manajemen Ilmu Vol.8, No. 1, 2019.	
18.	Lindawati (2024) “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS di SMK XYZ Jakarta”	Variabel Independen: Akuntabilitas, Transparansi Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Dana BOS	Variabel Independen: Partisipasi Komite Sekolah	Akuntabilitas dan Transparansi secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS.	Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Vol. 1, No. 5, 2024, E-ISSN: 3046-4560	
19.	Fajar dan Sulistiawati (2024) “Pengaruh Akuntabilitas,	Variabel Dependen : Efektivitas Pengelolaan Dana BOS	Lokasi penelitian: SMA di Kota	Secara parsial akuntabilitas dan transparansi tidak berpengaruh	Jurnal Financia, Vol. 5 No. 2 Juli 2024	

	Transparansi dan Partisipasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS pada SMP Negeri di Kecamatan Cimahi Selatan”		Tasikmalaya	terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, Sedangkan Partisipasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.		
20.	Amin, Indriani dan Mariadi (2022) “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Mataram Tahun 2021”.	Variabel Independen: Akuntabilitas, Transparansi	Variabel Independen: Partisipasi Komite Sekolah Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan Dana BOS	Pengelolaan dana BOS berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi (1) keterlibatan stakeholders dalam pengelolaan dana BOS, dan (2) kejelasan aturan dalam pengelolaan dana BOS.	Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, Vol.2, No. 1 (2022), P-ISSN 2798-0278 E-ISSN 2964-8939.	

Sumber: diolah oleh peneliti

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2016:60), kerangka pemikiran merupakan suatu model konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori dan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai isu penting. Pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh sekolah memerlukan adanya akuntabilitas dalam proses pelaksanaannya. Dengan adanya akuntabilitas, dapat diketahui apakah kinerja sekolah dapat diterima atau tidak oleh para pemangku kepentingan. Tingginya tingkat akuntabilitas akan berbanding lurus dengan efektivitas pengelolaan dana BOS, sedangkan rendahnya

akuntabilitas akan menyebabkan rendahnya efektivitas pengelolaan tersebut. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dianggap telah beroperasi secara efektif (Rachmi, 2017) .

Hal ini sejalan dengan (*agency theory*) yang menyatakan Teori Keagenan (*agency theori*) menggambarkan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan yang berfokus pada pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Dalam konteks ini, teori tersebut menyoroti interaksi antara (prinsipal) masyarakat dan agen (sekolah). Teori keagenan mengemukakan bahwa agen cenderung bersikap mengutamakan kepentingan pribadi (*self-interest*), yang seringkali bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Untuk mengatasi ini, prinsipal biasanya menetapkan mekanisme pengawasan agar agen tidak bertindak oportunistik dan tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Dalam teori ini juga disebutkan bahwa prinsipal memiliki dua opsi untuk mengurangi permasalahan keagenan dan mencegah perilaku oportunistik dari agen (Supriyono, 2018:63).

Penelitian terdahulu yang mendukung pernyataan diatas adalah penelitian Rakhmawati (2018), Ammar dan Bustamam (2019), Tanjung et al., (2022), Yusra et al., (2021), dan Rachman et al., (2022) menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Agestina et al., (2023) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.

Menurut Krina (2013:34) prinsip transparansi mencakup dua aspek utama, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi. Keterbukaan sekolah dalam menyediakan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat dan pihak eksternal diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat.

Keterbukaan yang diterapkan oleh pihak sekolah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, pelanggaran dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diminimalkan. Selaras dengan teori efektivitas, keterbukaan ini memungkinkan sekolah mencapai tujuannya, serta memastikan bahwa anggaran yang diperoleh tersalurkan secara tepat sasaran. Oleh karena itu, transparansi berperan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana BOS di sekolah (Pamungkas, 2021:21).

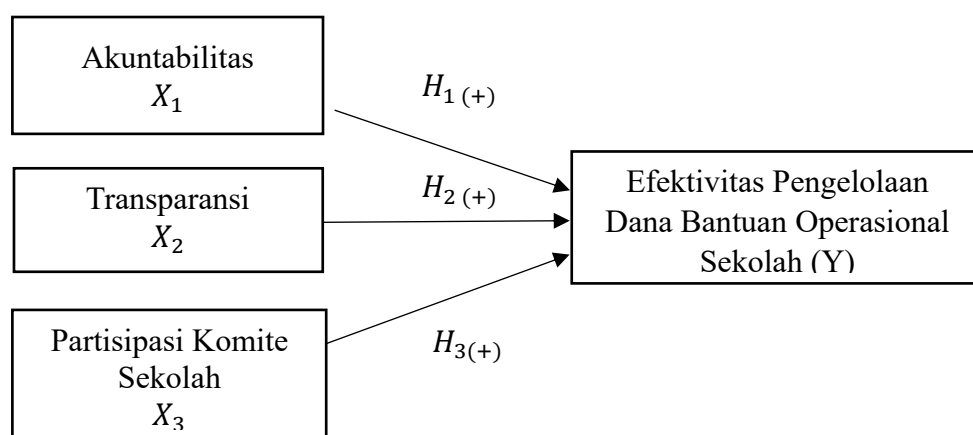
Penelitian terdahulu yang mendukung pernyataan diatas adalah penelitian Agestina et al., (2022), Tanjung et al., (2022), Rachman et al., (2022) dan Innawati et al., (2024) menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rakhmawati (2018) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.

Dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana BOS perlu adanya partisipasi orang tua untuk meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan dana BOS dan pemenuhan kebutuhan pendanaan. Jika terdapat kepercayaan terhadap

pihak sekolah sebagai pengelola dana, maka partisipasi akan mengalami peningkatan.

Penelitian terdahulu yang mendukung pernyataan diatas adalah penelitian Tanjung, Masnila dan Mubarak (2022) menyatakan bahwa partisipasi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Rina (2020) menyatakan bahwa partisipasi berpengaruh negatif terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan di muka, dimana variabel dependen (Y) dari penelitian ini adalah Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sedangkan untuk variabel independen adalah Akuntabilitas (X), Transparansi (X), dan Partisipasi Orang Tua (X). Sehingga kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara untuk pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan (Sugiyono, 2013: 64). Hipotesis berfungsi untuk menetapkan batasan dan memperkecil ruang lingkup penelitian, serta berperan sebagai pedoman proses pengujian (Himawati, 2017: 50). Berdasarkan permasalahan, teori dan kerangka pemikiran yang ada, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- 1) H_1 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- 2) H_2 : Transparansi berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- 3) H_3 : Partisipasi Komite Sekolah berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).